



RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
Selasa, 29 Juli 2025

TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						
FORMULIR BERITA						
				Register No :		
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI : MENTERI DALAM NEGERI UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI						
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 500.2.3/4104/SJ DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR <i>ONLINE</i> PD HARI SELASA TGL 29 JULI 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI <i>ZOOM MEETING</i> DGN <i>MEETING ID 677 057 3756</i> <i>PASSWORD INFLASI KMA</i> DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL <i>YOUTUBE</i> KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA <i>ONLINE</i> BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA <i>ONLINE</i> BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DI INFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI <i>DRESS CODE</i> PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA EEE TTK DUM TTK HBS						
TANGGAL PEMBUATAN 27 Juli 2025						
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal <u>Tomsy Tohir</u>	No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :			Terima	Kirim		
Tanda Tangan :						

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	WARTONO, SE	Wakil Wali Kota		1
2	Sri Lailani	Asisten	P	2
3	DIAN FUDHA ASDRI	BAG EKOSDA		3
4	Rudin	—		4
5	Eddy Sibar	Disduk		5
6	Krisman	Diskeominfo	L	6
7	M. Suryadi	D. & K. U. & K. & K.	L	7
8	Agus Muslim	Bpr Kota Bjb	L	8
9	Isnani, Zain	Bappperda	P	9
10	Lisa Indria	Inspektorat	P	10
11	Arief R.H	BPRAD	✓	11
12	Ferry Fudina	Umum		12
13	Lilis	umum		13
14	Syahrudin	Ekos & son	L	14
15	Abal	Pamwal		15
16	Siswandi	Pamwal pn pp		16
17	Yana.	Ekonomi & sda		17
18	Yoga	AIDC		18
19	Imam Fitri Cahyadi	Prakopim		19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/4104/SJ Tanggal 27 Juli 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Selasa, 29 Juli 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Realisasi penyaluran beras SPHP Beras Juli-Desember 2025 sebesar 0,28% atau 3.715 ton dari total pagu tahun 2025 1,3 juta ton.
 - b) Peran pemerintah daerah dalam SPHP beras
 - Koordinasi Intensif: koordinasi dengan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang perum bulog di penyaluran sphp beras dan bantuan pangan beras.
 - Optimalisasi penyaluran: masifkan penyaluran pedagang kios pasar tradisional, GPM dan koperasi KDMP dan outlet/kios pangan binaan pemda.
 - Dokumentasi & Pemantauan: dokumentasikan dan penyebaran informasi/berita kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan bersama satgas pangan Polri.
 - c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
 - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,73 juta ton setara beras
 - Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 17 Juli 2025 sebanyak 4,24 juta ton)
 - Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 182 ribu ton)
 - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli)
 - Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 4.564 kali di 274 kab/kota dan 35 provinsi.
 - Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.015 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
 - Kios pangan sebanyak 1.203 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 109 kab/kota.
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
 - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
 - B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
 - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi

2. BADAN PUSAT STATISTIK

- a) Melihat historis empat tahun terakhir, pada bulan Juli dominan mengalami inflasi kecuali di Juli 2024. Inflasi Juli biasanya lebih tinggi dibandingkan inflasi Juni, inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022 sebesar 0,64%. Kelompok pengeluaran yang biasanya menyumbang andil inflasi terbesar pada bulan Juli.
- b) Inflasi bulan ke bulan 0,19% (Juni 2025 terhadap Mei 2025), inflasi tahun ke tahun 1,87% (Juni 2025 terhadap Juni 2024) dan inflasi tahun kalender 1,38% (Juni 2025 terhadap Desember 2024).
- c) Pada M4 Juli 2025, tercatat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 1 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 36 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.
- d) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M4 Juli 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.
- e) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Kupang dengan nilai perubahan IPH 6,99%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras dan bawang merah.

3. Bulog

- a) Pada tahun 2025 Perum BULOG telah menyalurkan SPHP Tahap I sebesar 100.955 ton dan HBKN sebesar 80.214 ton.
- b) Total realisasi SPHP Juli 2025 sebesar 4.496.620 kg
- c) Perum Bulog mulai melakukan penyaluran beras SPHP di toko pengecer dan kegiatan Pasar Murah.

4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Berdasarkan data SP2KP per 28 Juli 2025, terjadi kenaikan harga beras medium dan premium di sebagian besar wilayah. Tercatat 37 provinsi berada di atas HET medium, sementara tercatat 36 provinsi berada diatas HET premium.
- b) Dukungan peran Pemda guna mendorong perdagangan komoditas antar wilayah:
 - Perlunya mapping data dan informasi komoditas (sentra produksi dan kebutuhan masing-masing wilayahnya).
 - Mendorong optimalisasi komoditas potensial di wilayahnya.
 - Melakukan inisiasi – inovasi dalam mengoptimalkan peran BUMD, Koperasi dan/atau pembinaan terhadap mitra pelaku usaha sebagai off taker.
 - Memberikan dukungan alokasi anggaran.
 - Pemanfaatan sarana perdagangan dan kolaborasi program Pemerintah guna efisiensi distribusi.
 - Menginisiasi kegiatan temu usaha antara wilayah sentra produksi dan sentra konsumsi untuk melaksanakan perdagangan komoditas antar wilayah.
 - Kerja Sama Perdagangan Komoditas Antar Wilayah perlu diarahkan pada tujuan membantu Pemerintah - Pemda dalam menjaga ketersediaan-pasokan komoditas barang kebutuhan pokok, stabilitas harga, mengurangi disparitas harga serta mendukung pengendalian

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

inflasi.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi KAD khususnya komitmen pelaku usaha yang terlibat

5. KEMENTERIAN PERTANIAN

- Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2.137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya
- Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya.
- Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2,716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya.
- Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri
- Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan.
- Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor
- BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera
- Sukseskan program Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

6. KANTOR STAF PRESIDEN

- Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 25 Juli 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	Kedelai	Daging Sapi	Cabai Merah Keriting
	Waspada	Minyakita, Gula Pasir Curah	Bawang Putih	Jagung Tk Peternak, Telur Ayam Ras
	Tidak Aman		Bawang Merah, Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Beras Medium (Zona 3)	Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 25 Juli 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Jayawijaya	8	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Morauke	8	Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Poternak
Kota Ternate	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Nabire	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Manokwari	4	Bawang Putih, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Jagung Tk Poternak
Kab. Kayong Utara	4	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Sorong Selatan	3	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Minyakita
Kota Jayapura	3	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Sorong	3	Bawang Putih, Kedelai, Jagung Tk Poternak
Kota Kupang	3	Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Berau	3	Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Daging Sapi
Kab. Sumba Timur	3	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Timor Tengah Selatan	3	Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Belitang Timur	2	Bawang Merah, Daging Ayam Ras
Kota Tual	2	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah
Kab. Sukamara	2	Bawang Putih, Telur Ayam Ras
Kota Cilegon	2	Bawang Putih, Jagung Tk Poternak
Kab. Mimika	2	Beras Medium, Telur Ayam Ras
Kab. Minahasa Selatan	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Morowali	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kota Manado	2	Beras Medium, Telur Ayam Ras
Kab. Bulungan	2	Cabai Merah Keriting, Daging Sapi
Kota Gunungsitoli	2	Gula Pasir Curah, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Poternak

- c) Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab dan Kota
- Per Juni 2025, total stok CPPD kab dan kota sebanyak 13.409,42 ton
 - Dari 38 Provinsi di Indonesia, tercatat 32 Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Sementara itu, 6 Provinsi lainnya belum menjalankan kegiatan tersebut, yaitu Provinsi Maluku, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan DKI Jakarta
 - Dari 514 Kabupaten/Kota, tercatat 322 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki stok CPPD, sedangkan 192 Kabupaten/Kota belum memiliki CPPD

7. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR).

Rekomendasi pendataan perumahan di tingkat daerah

- Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
- Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Crosscheck terhadap target Unit Renovasi Rumah/Pembangunan Baru sesuai dengan informasi yang kami sampaikan.
- Perlu perhatian khusus Pemerintah Daerah untuk menggerakkan Pemerintah Desa dan Dinas terkait dalam melakukan pendataan perumahan.

Arahan strategis kepada Pemerintah Daerah yaitu:

- Mensosialisasikan secara masif program PBG dan BPHTB Secara Gratis pada seluruh masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh PEMDA (Videotron, Baliho, Medsos Pemda, dll)
- Melakukan pendampingan kepada Desa dalam Musrembang Desa agar menganggarkan kegiatan Perumahan dalam APBDesa.
- Menganggarkan Pembangunan Rumah Baru/RTLH dalam APBD.
- Mengkoordinasikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pendataan perumahan Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan turut serta berkoordinasi Kepada PemKab, PemDes,

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

maupun Dinas/OPD terkait dengan Pendataan Perumahan.

- e) Meningkatkan pengawasan kepada Developer/Pengembang Perumahan agar perumahan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dalam PBG dan SitePlan yang telah di sah-kan agar Masyarakat Mendapatkan Hak-Haknya.
- f) Melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai Perumahan terutama lahan negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan(Lahan Kas Desa, Lahan Pemerintah Daerah, Lahan Negara, Lahan Kementerian/Lembaga, Lahan Hibah Masyarakat) yang dapat digunakan untuk perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

8. SATGAS PANGAN POLRI

- a) Upaya Satgas Pangan Polri dalam pengendalian inflasi:
 - Melaksanakan rapat koordinasi terkait teknis dan sosialisasi penyaluran bantuan pangan dan SPHP beras.
 - Pembuatan surat telegram terkait jukrah pengawasan dan pengecekan langsung pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
 - Satgas pangan pusat dan daerah aktif dalam pengawasan pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
 - Selain itu Satgas Pangan Polri juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bantuan pangan dan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga beras yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat.
- b) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu:
 - memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis (beras bantuan pangan, beras SPHP/stabilisasi pasokan dan harga pangan) dengan melibatkan K/L terkait serta satuan kewilayahan untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketepatan sasaran distribusi.
 - Melakukan monitoring secara intensif terhadap tren kenaikan harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen, guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis tersebut.
 - Melaksanakan pengawasan ketat terhadap praktik penjualan beras ditingkat produsen, khususnya dalam aspek mutu, takaran dan harga jual, untuk mencegah potensi penyimpangan serta melindungi kepentingan konsumen dan kestabilan pasar.

9. TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Juli 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI sudah bangun 55 BTP dan kompi produksi
- e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-4 Juli 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar -0,23 (Deflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Putih (-0,2975), Daging Ayam Ras (-0,2409), dan Cabai Merah (-0,0776). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakuakan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru